

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan pariwisata di suatu daerah harus didasarkan pada perencanaan, pengembangan, dan arah pengelolaan yang jelas agar semua potensi yang dimiliki bisa optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendapat hasil yang optimal, pengembangan dalam bidang kepariwisataan tidak hanya didukung oleh satu pihak tetapi merupakan kerjasama dari berbagai pihak, baik kalangan usaha (swasta), tokoh adat (budaya) maupun pihak pejabat pemerintah sendiri. Lebih penting lagi adalah adanya keterlibatan masyarakat sebagai salah satu faktor keberhasilan pengembangan pariwisata. Tanpa melibatkan masyarakat, pembangunan pariwisata hanya akan melahirkan produk-produk wisata yang kurang berarti bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi kata kunci pada setiap program pengembangan pariwisata, seolah-olah menjadi label baru yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proyek pengembangan pariwisata (Wardiyanto, 2011).

Pariwisata merupakan sektor andalan Kabupaten Pesisir Selatan yang akhir-akhir ini mendapat perhatian lebih oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini guna mendukung amanat Nawacita RPJMN 2015-2019, yaitu membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dengan dimensi pembangunan sektor unggulan pariwisata. Kabupaten Pesisir Selatan yang baru saja keluar dari daerah tertinggal, menyadari

besarnya potensi dan perlunya pengelolaan pariwisata yang baik (RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Hal. II-11).

Daerah Pesisir selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki berbagai panorama alam indah yang memanjang dari Utara batas Kota Padang hingga Kabupaten Muko muko, Provinsi Bengkulu dengan garis pantai mencapai 264, 2 kilometer. Kawasan pariwisata merupakan andalan dari kabupaten ini, sehingga Pessel menjadi salah satu daerah kunjungan wisata utama di Sumbar Pesisir selatan memiliki banyak potensi wisata bahari dan alam yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke daerah Pesisir Selatan. Sesuai dengan nama daerahnya “pesisir” daerah ini menawarkan banyak wisata pantai. Kabupaten pesisir selatan diukuti dengan “Negeri Sejuta Pesona” mengingat banyaknya wisata dan keelokan alam yang ditawarkan di kabupaten ini. (<http://kerjasamarantau.sumbarprov.go.id/berita-geliat-pembangunan-pariwisatakabupaten-pesisir-selatan-pessel-butuh-investor.html>).

Di daerah pesisir banyak terdapat objek wisata yang tidak kalah menarik dengan objek wisata di tempat lain. Di antaranya Pantai Carocok, Batu Kereta, Pulau Cingkuak, Bukit Langkisau, dan Air Terjun Timbulun (Pertiwi, 2014).

Pulau Cingkuak, meski sebelumnya nama ini tidak sepopuler Pulau Cubadak dan pulau wisata lainnya di Sumatera Barat. Namun, akhir-akhir ini pulau yang berada di Pesisir Selatan ini mulai dilirik wisatawan. Bahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terus merestorasi sejumlah prasarana di objek wisata termasuk Pulau Cingkuak. Pulau dengan luas lebih

kurang 4 hektar ini terlihat begitu terlihat dekat dari daratan Sumatera, terdapat sebuah Benteng Portugis dan Prasasti Madame Van Kempen yang merupakan saksi sejarah kolonial di Kabupaten Pesisir Selatan, yang pada masa itu merupakan pusat perekonomian dan pelabuhan pantai barat Sumatera (<https://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/pulau-cingkuak-objek-wisata-nan-indah-miliki-nilai-sejarah>).

Sejauh ini, pengembangan dan pengelolaan wisata bahari di Pulau Cingkuak masih sangat rendah dalam tatanan pengelolaan dan strategi pengembangan. Tingkat pengelolaan yang rendah akan mengakibatkan pengembangan wisata yang buruk dan tidak terarah, yang akan memberikan dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan. Strategi pengembangan wisata yang lemah, juga mengakibatkan banyak sektor wisata tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi, baik bagi devisa negara maupun kesejahteraan masyarakat lokal. Pengelolaan dan pengawasan yang pada akhirnya akan dapat diwujudkan pengembangan pariwisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Amalia dan Rendra, 2018).

Seiring meningkatnya jumlah kunjungan ke Pulau Cingkuak dari tahun ketahun, namun sampai saat ini belum adanya peta ekowisata yang menunjukan bagaimana kondisi ekowisata yang ada di Pulau Cingkuak. Keterbatasan jumlah informasi peta dan sebaran kawasan ekowisata seperti ini tentu dapat menurunkan eksistensi pariwisata yang ada. Wisatawan cenderung melakukan perjalanan wisata pantai seperti berenang, bermain *skybot*, tentu hal ini akan menyulitkan mereka untuk mengetahui daerah tujuan wisata yang tersebar (Eboy, 2017).

Peta ekowisata memainkan peran penting dalam dunia kepariwisataan baik untuk media pembelajaran atau memperoleh informasi tentang tempat-tempat wisata di sekitar kita. Oleh karena itu, agar dapat memberikan informasi yang baik dalam industri pariwisata, peneliti mencoba membangun sebuah produk berupa peta yang dapat menyediakan informasi mengenai kawasan ekowisata dari Pulau Cingkuak agar dimasa yang akan datang bisa digunakan untuk strategi kebijakan dan pengembangan Pulau Cingkuak.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kajian pemetaan partisipatif pada kawasan ekowisata bahari Pulau Cingkuak Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bagaimana strategi kebijakan dan pengembangan ekowisata Pulau Cingkuak.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Melakukan pemetaan partisipatif masyarakat pada kawasan ekowisata bahari Pulau Cingkuak melalui pemetaan *Geographic Information System* (GIS) di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Menganalisis strategi dan arah kebijakan bagi pengembangan ekowisata Pulau Cingkuak di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan dan rujukan bagi pemerinatah kabupaten Pesisir Selatan dalam pengembangan ekowisata dimasa yang akan datang.
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat maupun swasta yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata pulau kecil untuk dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan pulau-pulau kecil.
3. Sebagai referensi dan sumber bacaan dalam bidang pengelolaan wilayah perairan, pesisir dan kelautan.